

## SUSUNAN REDAKSI

### **Pelindung :**

Rektor Universitas Komputer Indonesia  
Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto

### **Penanggung Jawab :**

Dekan FISIP Universitas Komputer Indonesia  
Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA

### **Pengarah :**

Andrias Darmayadi, S.IP., M.Si., Ph.D  
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP., M.Si.  
Drs. Manap Solihat, M.Si.

### **Pemimpin Redaksi :**

Dewi Triwahyuni, S.IP., M.Si.

### **Anggota Redaksi :**

Inggar Prayoga, S.I.Kom., M.I.Kom  
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.  
Tatik Fidowaty, S.IP., M.Si.  
Rino Adibowo, S.IP., M.I.Pol.  
Sangra Juliano, S.I.Kom., M.I.Kom  
Sylvia OctaPutri, S.IP.

### **Tata Usaha :**

RatnaWidiastuti, A.Md

### **Terima Kasih Kepada Mitra Bestari**

Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA  
Prof. Dr. Hj. Aelina Surya, Dra.

## **KEBIJAKAN EDITORIAL**

Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu (JIPSi) adalah Jurnal yang memuat artikel ilmiah tentang gagasan konseptual, kajian teori, aplikasi teori dan hasil riset. JIPSi ini dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan dan informasi terkini dalam bidang ilmu politik dan ilmu komunikasi. JIPSi diterbitkan secara berkala oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia (FISIP Unikom) setiap enam bulan sekali.

JIPSi menerima artikel dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Artikel yang dikirimkan harus orisinal dan belum atau sedang dipublikasikan oleh Jurnal lain.

Artikel yang dimuat dalam JIPSi telah melalui proses seleksi mitra bestari atau editor dengan memperhatikan persyaratan baku publikasi Jurnal, metodologi penelitian dan kontribusi dalam pengembangan ilmu politik dan ilmu komunikasi. Naskah dikirimkan dengan format Ms.Word melalui email: Redaksi.Jipsi@gmail.com atau mengirimkan *hard copy* dilengkapi dengan *soft copy/CDRW* ke alamat redaksi JIPSI.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi redaksi :

### **REDAKSI JIPSi**

Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi

Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Komputer Indonesia

Kampus II, Lt.I

Jalan Dipatiukur No.112-116 Bandung 40132

Telp. (022) 2533676

Email: Redaksi.Jipsi@gmail.com

Website: <http://jipsi.fisip.unikom.ac.id>

Twitter: @RedaksiJIPSI

## DAFTAR ISI

PROLIFERASI NUKLIR KOREA UTARA: PENANGKALAN DAN DIPLOMASI KEKERASAN <i>Prilla Marsingga</i> .....	1
PRINSIP BEBAS AKTIF DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA: PERSPEKTIF TEORI PERAN <i>Agus Haryanto</i> .....	17
UPAYA INDONESIA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN P ERDAGANGAN PEREMPUAN (STUDI KASUS PERDAGANGAN PEREMPUAN DI BATAM) <i>Santi Suwandi</i> .....	29
FLEKSIBILISASI DAN KERENTANAN PASAR KERJA INDONESIA <i>Wulani Sriyuliani</i> .....	45
DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP PERLUASAN <i>MONEY LAUNDERING</i> DAN <i>DRUGS TRAFFICKING</i> DI INDONESIA <i>Rahmi Fitriyanti</i> .....	59
POTENSI MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA PELESTARIAN BUDAYA LOKAL <i>Ipit Zulfan, Gumgum Gumilar</i> .....	77
PERAN KOMUNIKASI DALAM AKTUALISASI STATUS SOSIAL <i>M. Ali Syamsuddin Amin</i> .....	87
KAJIAN AKADEMIK KEBERADAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN YANG DIMUNGKINKAN UNTUK KEMBALI MENJADI DESA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI <i>Fernandes Simangunsong</i> .....	97
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (STUDI DI DESA KARANGSONG KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT) <i>Rino Adibowo</i> .....	115
PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA <i>Lukman M. Fauzi, Angga Nurdin R, Iing Nurdin</i> .....	127



## PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Lukman M. Fauzi

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi

Email: lukmanulhakim.unjani@gmail.com

Angga Nurdin R, Iing Nurdin

Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi

Email: [angganr16@gmail.com](mailto:angganr16@gmail.com), [iingnurdin2002@yahoo.com](mailto:iingnurdin2002@yahoo.com)

### *Abstract*

*Disaster has become an integral part of human life , therefore man attempting to manage the disaster so that it takes up a lot of lives and property . In disaster management there are three stages namely mitigation , relief and reconstruction in which all these activities aim to minimize the threat to human life . Indonesian Armed Forces (TNI) in this regard has been given the mandate by Regulation No. 34 of 2004 about Indonesia Armed Forces to participate in disaster relief as part of Operasi Militer Selain Perang (OMSP). It can not be denied that Indonesia is geographically very high vulnerability to disasters . Therefore, the authors in this paper seeks to provide an overview of the role of the military in disaster management . The author took the DIY Province as the focus of the research , given the DIY Province is one area that is very often affected . This paper uses qualitative method by basing the analysis of the data obtained from informant interviews and field observations. This paper discusses the role of which is run by the military in the stages of the process of mitigation, disaster relief and reconstruction.*

*Keywords : Disaster, TNI, Yogyakarta*

### **Abstrak**

Bencana telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia, oleh karena itu manusia berusaha untuk mengelola bencana sehingga tidak memakan banyak nyawa dan properti. Dalam penanggulangan bencana ada tiga tahap yaitu mitigasi, bantuan dan rekonstruksi di mana semua kegiatan ini bertujuan untuk meminimalkan ancaman terhadap kehidupan manusia. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam hal ini telah diberikan mandat oleh Peraturan Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia untuk berpartisipasi dalam bantuan bencana sebagai bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia secara geografis kerentanan yang sangat tinggi terhadap bencana. Oleh karena itu, penulis dalam makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang peran militer dalam penanggulangan bencana. Penulis mengambil Provinsi DIY sebagai fokus penelitian, mengingat Provinsi DIY adalah salah satu daerah yang sangat sering terpengaruh. Makalah ini menggunakan metode kualitatif dengan mendasarkan analisis data yang diperoleh dari wawancara dengan informan dan observasi lapangan. Makalah ini membahas peran yang dijalankan oleh militer dalam tahapan proses mitigasi, bantuan dan rekonstruksi bencana.

Kata kunci: Bencana alam, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Yogyakarta

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara dengan keunikan letak geografis yang memberikan keuntungan terkait dengan posisinya sebagai jalur pelayaran serta melimpahnya sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Namun, pada kenyataannya hal ini tidak pula dapat dilepaskan dari adanya ancaman yang muncul terkait dengan letak geografis Indonesia. Merujuk kepada geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (*volcanic arc*) yang memanjang dari Pulau Sumatera – Jawa – Nusa Tenggara – Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor<sup>83</sup>.

Kondisi kerentanan bencana ini tersebar merata hampir diseluruh wilayah Indonesia, tentunya dengan tingkat yang berbeda serta karakteristik bencana yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kerentanan cukup tinggi terhadap ancaman bencana adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Selain gempa bumi, tanah longsor DIY dan Jawa Tengah mempunyai ancaman bencana lain yakni letusan gunung Merapi<sup>84</sup>. DIY memiliki dua kategori kerentanan bencana

yakni bencana yang terkait dengan bencana yang bersifat klimatologi (banjir, tanah longsor, angin puting beliun), bencana yang bersifat vulkanologi (erupsi gunung api) dan bencana yang bersifat tektonik (gempa dan tsunami). Hal ini terlihat dari gempa besar yang terjadi pada tahun 2006 yang telah menelan korban jiwa mencapai angka lebih dari 6000, dengan puluhan ribu orang terluka, dari luka memar hingga patah tulang<sup>85</sup>.serta erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 2010 yang menurut data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sleman sebanyak 277 Orang. Belum lagi bencana-bencana lain yang seringkali terjadi di Provinsi DIY yang bukan hanya menimbulkan korban jiwa, namun juga kerugian materiil yang cukup besar.

Dalam setiap upaya terkait dengan penanggulangan bencana terdapat hal menarik dimana selain melibatkan instansi pemerintah (sipil) namun juga melibatkan instansi militer khususnya dalam hal ini adalah personil Tentara Nasional Indonesia (TNI). Bahkan dalam beberapa bencana yang terjadi peran dari TNI dalam bencana terlihat sangat dominan, demikian pun dengan bencana yang senantiasa terjadi di wilayah DIY. Kondisi ini yang kemudian menjadi perhatian peneliti untuk diangkat dalam tulisan ini, dengan maksud untuk membahas peran yang dijalankan oleh TNI dalam penanggulangan bencana yang difokuskan di wilayah DIY sebagai wilayah yang memiliki tingkat kerentanan bencana yang tinggi serta karakteristik bencana yang cukup beragam pula. Pembahasan dalam tulisan ini didasarkan kepada metode penelitian kualitatif dengan

83 Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana. Rencana Aksi Nasional : Pengurangan Risiko Bencana 2006-2007, (Perum Percetakan Republik Indonesia : Jakarta, 2006) II-1

84 M. Imam Zamroni, "Islam dan Kearifan Lokal dalam Penanggulangan Bencana di Jawa" *Jurnal Penanggulangan Bencana*, Vol. 2 No. 1 (2011) 1 (1-10).

85 A.M Diponegoro, Hubungan Antara Eratnya Hubungan Keluarga dan Kebahagiaan Keluarga di Daerah Gempa (Daerah Istimewa Yogyakarta) dalam Arie Noor Rakhman dan Istiana Kuswardani, Studi Kasus Gempa Bumi Yogyakarta: Pemberdayaan Kearifan Lokal Sebagai Modal Nasional Masyarakat Tanggung Menghadapi Bencana, *Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains dan Teknologi (SNAST) Periode III*, Yogyakarta 3 November 2012. 186

mengkombinasikan data primer berupa wawancara, observasi lapangan serta studi literatur untuk menginventarisasi dan kemudian menganalisis peran yang dijalankan oleh TNI dalam penanggulangan bencana di Provinsi DIY.

### 3. Pembahasan

#### 3.1. Manajemen dan Darurat Bencana.

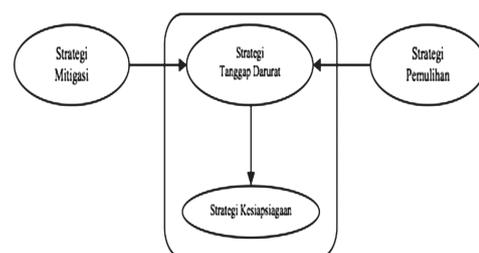
Bencana merupakan sebuah kejadian alam, buatan manusia atau perpaduan antara keduanya yang terjadi secara tiba-tiba sehingga menimbulkan dampak negatif yang dahsyat bagi kelangsungan kehidupan<sup>86</sup>. Selain itu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menjelaskan bencana sebagai sebuah peristiwa atau kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar<sup>87</sup>. Di Indonesia sendiri bantuan dalam penanggulangan bencana telah di institusioanlisasikan dalam wujud Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang memiliki perwakilan di setiap daerah. Namun, hal tersebut belum dapat menjawab tantangan dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Keterlibatan TNI dalam penanggulangan bencana saat ini di Indonesia menjadi komponen yang sangat penting tentu saja tanpa mengesampingkan pihak lain yang memiliki tugas dalam penanggulangan bencana.

Dalam menjalankan tugasnya untuk terlibat dalam penanggulangan bencana TNI mendasarkan kepada UU RI No. 34 tahun 2004 tentang TNI bertugas pokok melaksanakan operasi militer perang (OMP) serta operasi militer selain perang (OMSP), didalam tugas operasi militer selain

perang salah satunya adalah membantu menanggulangi akibat bencana alam. Dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana platform didasarkan kepada undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 membahas mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana dari landasan nilai, kelembagaan, distribusi kewenangan dan aturan hukum. Institusi pemerintah yang secara khusus ditunjuk menangani bencana, baik ditingkat pusat adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun daerah Provinsi/Kabupaten/Kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) beserta struktur yang melakukan fungsi pelaksana dan koordinasi pada saat tidak terjadi bencana dan fungsi komando pada saat tanggap darurat. Mekanisme kegiatan yang dilakukan dalam upaya penanggulangan bencana menurut UU Nomor 24 Tahun 2007, meliputi: Pra Bencana, kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat tidak terjadi bencana, yaitu pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penanggulangan bencana diperlukan manajemen darurat. Manajemen darurat merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan kesiapsiagaan darurat pada saat menjelang, saat kedarutan dan setelah terjadi kedarutan. Proses manajemen kedarutan terdiri atas 4 tahap, yaitu : tahap mitigasi, tahap kesiapsiagaan, tahap tanggap darurat dan tahap pemulihan, dapat dilihat pada Bagan 1.2 sebagai berikut:

**Bagan 1. Model Strategi Operasional Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**



Sumber : Canton, Emergency Management, 2007

86 S. Arie Priambodo, Panduan Praktis Menghadapi Bencana (Yogyakarta : Kanisius, 2009) 22.

87 Ferry Efendi dan Makhfudli, Keperawatan Kesehatan Komunitas : Teori dan Praktik dalam Keperawatan (Jakarta : Salemba Medika, 200 ) 161.

Ruang lingkup dalam manajemen darurat, meliputi: kesiapsiagaan (siaga darurat), tanggap darurat dan pemulihan darurat. Inovasi pada fase transisi dampak (segera sebelum, selama dan setelah dampak) meliputi tindakan yang tidak hanya berorientasi pada kebijakan tetapi berorientasi pada operasional pada waktu yang tepat dalam tekanan dan melakukan tindakan-tindakan tertentu serta berimprovisasi<sup>88</sup>.

### 3.2. Peran TNI dalam Tahapan Mitigasi Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta

Mitigasi bencana didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk mencegah bencana atau mengurangi dampak bencana<sup>89</sup>. Menurut Subiyantoro mitigasi bencana sesungguhnya berkaitan dengan siklus penanggulangan bencana berupa upaya penanganan sebelum terjadinya bencana<sup>90</sup>. Hal ini dilakukan sebagai sebuah tindakan preventif yang berfungsi untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan bencana yang berpotensi terjadi. Sebagai sebuah wilayah yang sangat rentan dengan bencana, Satuan Tugas (Satgas) TNI yang terdiri dari Angkatan Darat, Laut dan Udara yang berada di Yogyakarta dipersiapkan untuk memberikan bantuan dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.

Peran TNI dalam tahapan mitigasi bencana di Provinsi DIY ini dilakukan dalam dua kategori yakni mempersiapkan komponen manusia serta mempersiapkan infrastruktur untuk meminimalisir dampak bencana. Dalam mempersiapkan komponen

manusia, TNI melakukan kegiatan yang terkait dengan sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat, dimana materi sosialisasi ini disesuaikan dengan kondisi kebencanaan di wilayah masing-masing karena tidak dapat dipungkiri bahwa setiap daerah di Provinsi DIY memiliki kerentanan bencana yang berbeda antara satu dengan lainnya<sup>91</sup>. Hal ini menjadi penting mengingat kesiapsiagaan dari masyarakat serta pengetahuan akan bencana akan menjadi modal utama untuk meminimalisir korban jiwa yang seringkali jatuh akibat kurangnya pengetahuan mereka akan apa yang harus dilakukn saat bencana tersebut terjadi.

Disamping itu kesiapan dalam menghadapi terjadinya bencana juga dilakukan dalam struktur TNI maupun instansi terkait. Oleh karena itu pihak TNI yang dalam hal ini dikoordinasikan oleh Komando Resort Militer (Korem) 072/ Pamungkas senantiasa mengadakan sosialisasi serta koordinasi dalam setiap rapat yang melibatkan muspida maupun hingga level muspika. Selain melakukan koordinasi secara teknis, hal ini pun diperkuat dengan digelarinya gladi posko dan gladi lapangan (simulasi) dalam upaya penanggulangan bencana yang melibatkan tidak hanya unsur pimpinan daerah tetapi juga pelaksana dilapangan serta masyarakat<sup>92</sup>. Simulasi ini menjadi penting mengingat dalam kondisi bencana maka koordinasi serta kesiapan dari masing-masing instansi mutlak menjadi hal yang sangat menentukan keberhasilan dari penanggulangan bencana tersebut. Karena dalam hal ini perlu disadari bahwa dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana TNI ataupun instansi lain tidak dapat bergerak sendiri-sendiri. Oleh karena itu simulasi yang digelar dalam bentuk gladi posko maupun gladi lapangan akan

88 James Kendra dan T. Watchendorf, *Creativity and Coordination in Disaster Management* dalam *Proceeding of the 4<sup>th</sup> Workshop for Comparative Study on Urban Earthquake Disaster Management*, Kobe, Jepang, 29-30 Januari 2004. 78.

89 Raden Cecep Permana, Isman Pratama Nasution dan Jajang Gunawijaya, "Kearifan Lokal Tentang Mitigasi Bencana Pada Masyarakat Baduy", *Makara Sosial Humaniora*, Vol. 15 No. 1 (Juli 2011) 68 (67-68).

90 Subiyantoro, I. "Selayang Pandang tentang Bencana", *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, Vol. 1 (2010) 45 (43-46)

91 Hasil Wawancara dengan Komandan Distrik Militer Kota Yogyakarta Letkol Ananta Wira pada 11 Juli 2013.

92 Hasil Wawancara dengan Komandan Komando Resort Militer 072/ Pamungkas Brigjen TNI Adi Wijaya 12 Juli 2013.

memperkuat koordinasi serta harmonisasi pergerakan bila terjadi bencana di wilayah DIY.

TNI dalam hal ini Angkatan Darat melalui satuan komando kewilayahan (satkowil) yang berada dibawah Korem 072/ Pamungkas baik pada tingkat kodim maupun koramil membina masyarakat yang tergabung dalam relawan bencana. Relawan bencana ini diposisikan sebagai mitra dari pihak TNI untuk memberikan informasi-informasi secara cepat dan tepat mengenai terjadinya bencana di wilayah mereka masing-masing dengan menggunakan radio transmitter<sup>93</sup>. Contoh dari hal ini adalah dengan pemberdayaan dari relawan untuk melakukan pengawasan terhadap aliran lahar dingin gunung merapi yang mengarah ke Kali Code yang dilakukan oleh Kodim Sleman. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang cepat dan tepat mengenai kondisi aliran lahar dingin Gunung Merapi yang seringkali membanjiri wilayah yang dilalui oleh Kali Code setiap terjadinya hujan di wilayah lereng Merapi. Dengan adanya informasi mengenai aliran lahar dingin tersebut maka bila ada potensi banjir lahar dingin yang mengarah ke wilayah Kota Yogyakarta, maka tindakan evakuasi warga yang berada di pinggiran kali Code dapat dilakukan dengan cepat sehingga mampu meminimalisir terjadinya korban jiwa.

Disamping itu TNI juga melakukan upaya pendataan terhadap penduduk yang tinggal di wilayah rawan bencana, seperti di Lereng Gunung Merapi, bantara Sungai yang dilewati lahar dingin, maupun di wilayah pesisir pantai. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan proses evakuasi terkait dengan mobilisasi maupun kesiapan dari tempat pengungsian yang akan dipersiapkan oleh pihak terkait. TNI

dalam hal ini memiliki kedekatan yang cukup erat dengan masyarakat sehingga mempermudah proses inventarisasi penduduk maupun harta benda yang mereka miliki. Inventarisasi harta benda khususnya hewan ternak maupun lainnya ini akan menjadi dasar dalam pemberian ganti rugi oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang tertimpa bencana. Keakuratan data yang dikumpulkan oleh pihak TNI tidak dapat dilepaskan dari kepercayaan dan kejujuran dari masyarakat kepada pihak TNI, dibandingkan dengan pendataan yang dilakukan oleh instansi lain.

Disamping itu TNI dalam hal ini TNI AD melakukan upaya-upaya pencegahan dampak bencana dengan membangun sarana atau infrastruktur seperti pembangunan tanggul penahan lahar dingin disepanjang Kali Code<sup>94</sup>. Pembangunan tanggul ini dimaksudkan untuk menahan luapan lahar dingin yang biasa terjadi di Kali Code, dimana biasanya luapan lahar dingin ini akan membanjiri wilayah pemukiman yang berada di sekitar bantaran kali tersebut. Setiap kali terjadi hujan deras di hulu sungai maka dapat dipastikan bahwa sungai akan di banjiri dengan material gunung Merapi yang terbawa oleh air menuju ke wilayah Kota Yogyakarta melalui Kali Code ini. Disamping itu pihak TNI bekerjasama dengan pemerintah Provinsi DIY juga melakukan upaya perbaikan terhadap akses-akses jalan yang akan digunakan sebagai jalur evakuasi, salah satu contohnya adalah perbaikan terhadap jalan menuju lereng Gunung Merapi yang selama ini rusak berat, padahal jalan tersebut senantiasa digunakan sebagai akses untuk melakukan evakuasi apabila terjadi letusan Gunung Merapi. Oleh karena itu TNI melalui program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) memberikan perhatian terhadap perbaikan infrastruktur jalan sebagai akses utama

<sup>93</sup> Hasil Wawancara dengan Komandan Kodim Sleman Letnan Kolonel Satrijo Pinandjo 13 Juli 2013.

<sup>94</sup> Hasil Wawancara dengan Komandan Kodim Kota Yogyakarta Letnan Kolonel Ananta Wira pada 11 Juli 2013.

evakuasi warga yang berada di sekitar lereng gunung Merapi tersebut.

### **3.3. Peran TNI Dalam Proses Tanggap Darurat Bencana.**

Meskipun telah melakukan upaya mitigasi, namun kenyataan dilapangan dalam proses tanggap darurat berbagai permasalahan di lapangan tetap harus dihadapi. Dimana tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses tanggap darurat bencana TNI yang terdiri dari AD, AU dan AL memainkan peranan yang cukup penting. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya peranan yang dijalankan oleh pihak TNI dalam proses ini, khususnya dalam masa tanggap darurat bencana yang terjadi di Provinsi DIY. TNI dalam hal ini memiliki peranan untuk melakukan evakuasi terhadap korban, distribusi bantuan serta memberikan jaminan keamanan selama proses pengungsian.

Evakuasi menjadi salah satu tindakan yang sangat penting saat terjadinya bencana, hal ini dilakukan untuk menjauhkan masyarakat dari lokasi bencana dengan tujuan menghindarkan jatuhnya korban jiwa akibat bencana tersebut. Peran TNI dalam evakuasi bencana letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 sebagai contohnya adalah dengan memberikan pengumuman serta menyiagakan truk-truk untuk mengangkut warga yang berada pada jalur awan panas untuk secepatnya menjauhi wilayah tersebut<sup>95</sup>. Selain itu proses evakuasi warga juga dilakukan saat bencana banjir lahar dingin di bantaran Kali Code, dimana personil TNI melakukan evakuasi terhadap warga khususnya yang telah lanjut usia untuk meninggalkan rumah mereka ketempat yang lebih aman. Disamping evakuasi untuk menghindarkan warga dari wilayah bencana, TNI menjadi ujung

tombak dalam evakuasi korban baik korban luka-luka maupun korban tewas akibat bencana tersebut. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila TNI selalu menjadi pihak pertama yang datang pada *ground-zero* (wilayah bencana) untuk memberikan pertolongan dan mencari korban akibat bencana tersebut. Seperti halnya pada kejadian letusan Gunung Merapi, pihak TNI serta BPBD yang kemudian masuk ke lokasi bencana untuk melakukan evakuasi terhadap korban awan panas.

Elemen penting dalam proses tanggap darurat adalah tersedianya logistik yang terkait dengan kebutuhan pokok dari para korban bencana. Hal ini menjadi sangat penting mengingat bahwa dalam setiap bencana senantiasa menggugah kepedulian dari pihak lain untuk membantu dimana salah satu bentuknya adalah dengan memberikan bantuan logistik berupa makanan, pakaian dan kebutuhan lainnya. Keberadaan bantuan tersebut sangatlah dibutuhkan khususnya oleh pengungsi yang terkena bencana tersebut, namun dalam kenyataannya seringkali bantuan tersebut tidak tepat sasaran serta tidak terdistribusi dengan baik. Kondisi ini yang kemudian menimbulkan kerentanan terkait dengan kecurigaan dari masyarakat terhadap distribusi bantuan sehingga mereka saling berebut untuk mendapatkan bantuan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut maka dalam distribusi logistik TNI memainkan peranan penting. TNI menjadi distributor bantuan dari mulai bantuan tersebut diterima, seperti halnya pada bencana Gempa pada tahun 2006 dan erupsi merapi tahun 2010 posko bantuan dibuat di Lapangan Udara Adisucipto, hal ini dilakukan untuk membuat jalur bantuan melalui satu pintu baik yang masuk maupun yang didistribusikan kepada masyarakat.

TNI AD kemudian menjalankan tugas untuk mendistribusikan bantuan tersebut

---

<sup>95</sup> Hasil Wawancara dengan Komandan Kodim Sleman Letnan Kolonel Satrijo Pinandoyo 13 Juli 2013.

ke wilayah-wilayah yang membutuhkan. Distribusi yang dilakukan ini menjadi sangat penting mengingat bila tidak dilakukan oleh pihak TNI maka seringkali bantuan tersebut dijarah oleh masyarakat sebelum tiba di wilayah yang sebenarnya menjadi sasaran distribusi atau terjadi kericuhan dalam proses pembagian kepada masyarakat<sup>96</sup>. Namun dengan dilakukan oleh pihak TNI maka kejadian tersebut terbukti dapat dihindari serta lebih tertib dalam pembagian kepada masyarakat. Disamping itu koordinasi dalam pendistribusian bantuan akan berjalan dengan lebih baik sehingga tidak ada bantuan yang terkonsentrasi di satu wilayah saja sementara wilayah lain kekurangan.

Bencana seringkali memaksa warga yang berada di wilayah tersebut untuk mengungsi demi keselamatan jiwa mereka. Namun seringkali kenyataan dilapangan warga yang berada di wilayah bencana tidak mau meninggalkan rumah mereka meskipun bencana yang terjadi berpotensi membahayakan nyawa mereka. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari kekhawatiran akan keamanan dari harta benda yang mereka tinggalkan bila mengungsi. Seperti halnya pada Erupsi Merapi tahun 2010 warga menolak untuk mengungsi karena khawatir ternak mereka akan dijarah atau mati<sup>97</sup>. Dalam kondisi ini diperlukan pihak yang dapat dipercaya oleh masyarakat untuk memberikan jaminan keamanan terhadap harta benda mereka. Oleh karena itu TNI bersama dengan Polri berserta masyarakat sendiri melakukan kegiatan pengamanan di wilayah bencana. Kegiatan pengamanan ini dilakukan dengan membatasi akses keluar dan masuk ke wilayah bencana serta melakukan patrol untuk menjamin keamanan dari harta benda yang

ditinggalkan mengungsi oleh warga.

### 3.4. Peran TNI dalam Proses Rekonstruksi Pasca Bencana.

Pasca terjadinya bencana bukan berarti semua tugas yang diemban baik oleh Pemerintah maupun TNI sudah selesai. Rekonstruksi pasca bencana menjadi salah satu tugas yang cukup berat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses penanggulangan bencana. Tugas berat ini terkait dengan upaya untuk memulihkan kondisi baik fisik wilayah maupun psikologis dari warga yang terkena musibah bencana tersebut. Karena tidak dapat dipungkiri bila akibat dari bencana yang terjadi khususnya di wilayah Yogyakarta yang termasuk dalam bencana nasional, dampak kerusakan secara fisik yang luar biasa serta dampak psikologis yang mendalam bagi warga yang terkena bencana tersebut. Oleh karena itu proses pemulihan baik sarana dan prasarana yang hancur akibat bencana serta pemulihan kondisi psikologis masyarakat menjadi sangat penting dalam proses ini.

Dalam proses rekonstruksi ini, TNI melaksanakan kegiatan untuk membangun kembali pemukiman warga yang hancur akibat bencana. Hal ini telah dilaksanakan kepada korban tanah longsong di wilayah Kulonprogo, dimana TNI membangun rumah-rumah warga ditempat dimana mereka direlokasi dari wilayah yang rawan akan tanah longsor<sup>98</sup>. Selain itu dalam proses rekonstruksi pada kejadian bencana lain seperti saat terjadi erupsi gunung Merapi, pihak TNI membangun tempat tinggal sementara bagi para pengungsi. Tempat tinggal sementara ini ditujukan sebagai tempat bagi para pengungsi selama menunggu proses relokasi maupun rekonstruksi wilayah mereka. Namun kegiatan ini tidak dilakukan secara massif

96 Hasil Wawancara dengan Komandan Komando Resort Militer 072/ Pamungkasi Brigjen TNI Adi Wijaya 12 Juli 2013.

97 Hasil Wawancara dengan Komandan Kodim Sleman Letnan Kolonel Satrijo Pinandjo 13 Juli 2013.

98 Hasil Wawancara dengan Komandan Komando Resort Militer 072/ Pamungkasi Brigjen TNI Adi Wijaya 12 Juli 2013.

hanya dilakukan dalam skala yang cukup kecil, namun meskipun demikian hal ini tetap memberikan bantuan yang cukup berarti bagi mereka.

Proses rekonstruksi yang dilaksanakan tidak dilakukan secara sepihak oleh TNI, namun dalam tahapan ini berbagai instansi pemerintah maupun pihak swasta (Lembaga Swadaya Masyarakat ) baik asing maupun domestik terlibat didalamnya. Pihak TNI dalam hal ini akan menjadi elemen pendukung yang menyediakan sumber daya manusia berupa prajurit untuk membantu proses rekonstruksi yang dilakukan terhadap wilayah yang terkena bencana. Hal ini terjadi karena dalam proses rekonstruksi bantuan yang datang langsung dibawa oleh pihak-pihak yang akan menyalurkan bantuan tersebut. Pihak TNI dalam hal ini tidak memiliki kewenangan untuk mengarahkan bantuan dalam proses rekonstruksi tersebut dan sifatnya hanya membantu secara teknis serta memberikan data mengenai kebutuhan rekonstruksi tersebut apabila diminta.

#### **4. Kesimpulan.**

Pembahasan yang dilakukan oleh penulis dengan melakukan penelitian secara langsung dalam memberikan analisis serta penggambaran terhadap peran TNI dalam penanggulangan bencana di Provinsi DIY menyimpulkan bahwa, tidak dapat dipungkiri TNI dalam hal ini memainkan peranan yang cukup dominan dalam upaya-upaya penanggulangan bencana. Peranan dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Provinsi DIY oleh pihak TNI telah secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik meskipun penulis merasa bahwa upaya tersebut belum dilakukan secara optimal dan komprehensif. Hal ini didasarkan kepada bahwa tidak dalam setiap proses penanggulangan bencana TNI berperan besar. Dimana dalam proses

mitigasi atau pencegahan TNI menjalankan kegiatan-kegiatan dengan sangat aktif serta memainkan peranan penting khususnya dalam melakukan edukasi serta penguatan koordinasi diantara instansi-instansi terkait dengan proses penanggulangan bencana. Disamping itu TNI juga memperhatikan infrastruktur yang akan berguna dalam meminimalisir dampak bencana dengan membangun atau memperbaiki infrastruktur yang telah ada. Selain itu peran yang dominan dari TNI dalam penanggulangan bencana ditunjukkan pada masa tanggap bencana. TNI menjadi tulang punggung dari berbagai kegiatan mulai dari evakuasi korban, distribusi bantuan hingga menyediakan pengamanan wilayah bencana. Namun dalam proses rekonstruksi bencana yang terjadi di wilayah Provinsi DIY, TNI kurang memiliki peranan dan hanya bersifat memberikan dukungan. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari banyaknya pihak-pihak yang menyalurkan bantuan serta menjalankan proses rekonstruksi secara langsung tanpa melakukan koordinasi dengan pihak TNI, khususnya terkait dengan rekonstruksi setelah bencana-bencana yang sifatnya nasional seperti gempa bumi tahun 2006 dan erupsi Gunung Merapi. Meskipun telah berjalan dengan cukup baik, namun tidak dapat dipungkiri bahwa tugas TNI dalam upaya penanggulangan bencana seperti yang tertuang dalam UU No 34 Tahun 2004 mengenai OMSP dapat dilakukan dengan lebih baik khususnya di wilayah Provinsi DIY tersebut. Hal ini terlihat dari potensi serta kesiapsiagaan serta kecakapan dalam proses-proses penanggulangan bencana yang telah ditunjukkan dalam pembahasan yang dilakukan oleh penulis. Tulisan ini diharapkan akan menjadi dasar atau awal bagi penelitian selanjutnya yang akan menganalisis faktor-faktor yang membuat peranan TNI dalam penanggulangan bencana di Provinsi DIY masih belum optimal.

## Daftar Pustaka

- A.M Diponegoro, Hubungan Antara Eratnya Hubungan Keluarga dan Kebahagiaan Keluarga di Daerah Gempa (Daerah Istimewa Yogyakarta) dalam Arie Noor Rakhman dan Istiana Kuswardani, Studi Kasus Gempa Bumi Yogyakarta : Pemberdayaan Kearifan Lokal Sebagai Modal Nasional Masyarakat Tanggung Menghadapi Bencana, *Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains dan Teknologi ( SNAST ) Periode III*, Yogyakarta 3 November 2012.
- Ferry Efendi dan Makhfudli, *Keperawatan Kesehatan Komunitas : Teori dan Praktik dalam Keperawatan*, Jakarta : Salemba Medika, 2009.
- Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana. Rencana Aksi Nasional : Pengurangan Risiko Bencana 2006-2007, Perum Percetakan Republik Indoneia : Jakarta, 2006.
- Kendra, James dan Watchendorf, T., Creativity and Coordination in Disaster Management dalam *Proceeding of the 4<sup>th</sup> Workshop for Comparative Study on Urban Earthquake Disaster Management*, Kobe, Jepang, 29-30 Januari 2004.
- M. Imam Zamroni, “Islam dan Kearifan Lokal dalam Penanggulangan Bencana di Jawa” *Jurnal Penanggulangan Bencana*, Vol. 2 No. 1 ( 2011 ) 1-10.
- Raden Cecep Permana, Isman Pratama Nasution dan Jajang Gunawijaya, “Kearifan Lokal Tentang Mitigasi Bencana Pada Masyarakat Baduy”, *Makara Sosial Humaniora*, Vol. 15 No. 1 ( Juli 2011 ) 67-68.
- S. Arie Priambodo, *Panduan Praktis Menghadapi Bencana*, Yogyakarta : Kanisius, 2009.
- Subiyantoro, I. “Selayang Pandang tentang Bencana”, *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, Vol. 1 (2010) 43-46.

## Hasil Wawancara

- Wawancara dengan Komandan Distrik Militer Kota Yogyakarta Letkol Ananta Wira pada 11 Juli 2013.
- Wawancara dengan Komandan Komando Resort Militer 072/ Pamungkasi Brigjen TNI Adi Wijaya 12 Juli 2013.
- Wawancara dengan Komandan Kodim Sleman Letnan Kolonel Satrijo Pinandojo 13 Juli 2013.

